



Peran Orang Tua Dan Komunitas Dalam Membangun Pendidikan Yang Inklusif

Inayatul Maula^{1*}

¹Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Pekalongan, Indonesia

email: Inayatul.Maula.24180@mhs.uingusdur.ac.id

Nur Khasanah²

²Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Pekalongan, Indonesia

email: nur.khasanah@uingusdur.ac.id

*Korespondensi: email: Inayatul.Maula.24180@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

History Artikel: *Inclusive education requires collaborative efforts that extend beyond the classroom, making the role of parents and communities essential in ensuring every child's right to learn without discrimination. This article examines how parental involvement and community participation contribute to creating learning environments that respect diversity and support students with different backgrounds, abilities, and social needs. Parents play a crucial role in reinforcing inclusive values at home, communicating openly with teachers, and advocating for their children's educational needs. Meanwhile, communities strengthen inclusion by providing social support, accessible resources, and positive cultural attitudes that encourage acceptance. The partnership between schools, families, and local communities builds a supportive ecosystem that enhances student engagement, emotional well-being, and equal opportunities. By understanding these interconnected roles, inclusive education becomes not only a school-based initiative but a shared social responsibility that promotes fairness and strengthens social cohesion.*

Diterima 1 Desember 2025
Direvisi 5 Desember 2025
Diterima 8 Desember 2025
Tersedia online 10 Desember 2025

Kata kunci:

Community participation, Diversity, Educational collaboration, Equal opportunities, Inclusive education, Parental involvement, Social support.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan tercapainya kesetaraan dalam kehidupan sosial. Karena itu, penerapan pendidikan yang bersifat inklusif yang mampu merangkul keberagaman peserta didik menjadi sangat krusial untuk mewujudkan tujuan tersebut. Meski konsep pendidikan inklusif telah dikenal luas di berbagai negara, praktik pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Salah satu persoalan terbesar adalah minimnya pemahaman serta dukungan terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusif, baik di kalangan pendidik maupun masyarakat umum. Dengan latar belakang itu, penelitian ini berupaya mengkaji sekaligus memperkuat penerapan pendidikan inklusif sebagai langkah strategis untuk membuka jalan menuju terciptanya kesetaraan (Santoso, 2023).

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh anak memperoleh kesempatan belajar tanpa pengecualian. Proses pembelajarannya dilakukan secara bersama-sama dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga setiap potensi yang mereka miliki dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks

ini, sekolah dituntut mampu menerima dan mendukung seluruh siswa, tanpa memandang hambatan fisik, sosial, kognitif, emosional, maupun bentuk perbedaan lainnya. Implementasi pendidikan inklusif menjadi sarana penting untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan. Konsep ini tidak hanya ditujukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi siswa reguler, karena setiap anak memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri. Oleh sebab itu, guru memerlukan kompetensi khusus agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif di kelas.

Meski demikian, penerapan pendidikan inklusif masih menghadapi beragam kendala. Keberhasilannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kebijakan sekolah, tingkat pemahaman, koordinasi antara guru dan orang tua, serta dukungan lingkungan. Sekolah sebagai lembaga formal memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan, sementara kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab menetapkan kebijakan yang tepat dan konsisten untuk mendukung pelaksanaan inklusi. Walaupun kebijakan baru tidak selalu mudah dijalankan, kepala sekolah dituntut membuat keputusan yang tepat dan berkomitmen pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi kepala sekolah dalam membangun budaya inklusif di sekolah dasar. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat bagaimana kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial kepala sekolah memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif (Hanan, 2025).

Pelatihan bagi guru dan staf sekolah memegang peran penting dalam mengurangi stigma dan praktik diskriminatif. Guru yang memiliki keterampilan dalam menangani isu keberagaman dan diskriminasi mampu menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif dan suportif. Mereka dapat mengidentifikasi serta mengatasi prasangka yang muncul, baik dalam diri sendiri maupun dalam interaksi antarsiswa. Selain itu, guru yang kompeten mampu menerapkan strategi pembelajaran yang ramah inklusi dan memastikan seluruh peserta didik diperlakukan secara setara. Keterlibatan komunitas sekolah termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam menekan stigma dan diskriminasi. Kegiatan kolaboratif yang menonjolkan nilai keberagaman dan inklusi dapat meningkatkan saling pengertian antar siswa, sementara dukungan orang tua dan masyarakat membantu memperkuat budaya sekolah yang menghormati perbedaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan dalam penerapan pendidikan inklusif. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, penolakan dari sebagian guru atau staf, serta lemahnya dukungan administrasi sekolah. Berbagai kendala tersebut perlu diatasi melalui komitmen jangka panjang dan kerja sama seluruh pihak. Penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan administratif menjadi langkah kunci bagi keberhasilan pendidikan inklusif. Secara keseluruhan, pendidikan berperan besar dalam menekan stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial. Melalui penerapan prinsip inklusi, pengembangan kurikulum berorientasi keadilan sosial, peningkatan kompetensi guru, dan keterlibatan komunitas sekolah, lingkungan pendidikan yang lebih adil dan suportif dapat diwujudkan. Meskipun implementasinya tidak terlepas dari tantangan, upaya berkesinambungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan. Penelitian ini memberikan perspektif penting bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti dalam meningkatkan mutu pendidikan serta mendorong keadilan sosial di sekolah (Harefa, 2024).

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam proses, tantangan, serta faktor pendukung dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah. Penelitian ini berfokus pada pengalaman langsung para guru, kepala sekolah, orang tua, dan anggota komunitas sekolah yang terlibat dalam praktik pendidikan inklusif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, serta telaah dokumen seperti kebijakan sekolah, program pelatihan guru, dan catatan kegiatan.

komunitas. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih bebas. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana praktik inklusi diterapkan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antar-tema yang muncul dari temuan lapangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika pendidikan inklusif secara komprehensif, termasuk kompetensi pendidik, dukungan komunitas, serta hambatan yang muncul dalam upaya membangun lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif.

Hasil

Keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada keterlibatan orang tua, tetapi juga mencakup kontribusi berbagai pihak seperti komunitas lokal, lembaga sosial, serta organisasi non-pemerintah. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Hilmy (2003:45), yang menegaskan bahwa pendidikan berlandaskan multikulturalisme harus melibatkan beragam unsur masyarakat agar tujuan pendidikan yang lebih luas dapat tercapai. Karena itu, keterlibatan masyarakat dapat dipahami sebagai penghubung antara pendidikan formal dengan nilai-nilai dan praktik budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Salah satu kontribusi utama dari partisipasi masyarakat adalah kemampuannya dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif. Lingkungan belajar seperti ini memungkinkan setiap siswa merasa dihargai dan diterima tanpa memandang perbedaan budaya, agama, maupun etnis. Dalam praktiknya, keterlibatan orang tua dan komunitas lokal dalam penyusunan kurikulum dapat menghasilkan materi ajar yang lebih kontekstual serta mencerminkan keragaman budaya. Misalnya, pada sekolah yang memiliki siswa dari kelompok adat tertentu, mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam proses pembelajaran dapat memberikan pemahaman penting mengenai tradisi dan nilai budaya yang relevan untuk dikenalkan kepada peserta didik (Lensa, 2025).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) di tingkat sekolah dasar umumnya dikenali melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh guru kelas bersama tim pendukung seperti konselor sekolah. Di SDN Ciracas, proses ini dilakukan dengan memantau perkembangan belajar siswa dari kelas I sampai kelas VI. Siswa yang menunjukkan hambatan dalam aspek akademik, sosial, maupun fisik biasanya mulai mendapat perhatian lebih. Jenis kebutuhan khusus yang sering muncul di sekolah dasar mencakup kesulitan belajar, gangguan perilaku, autisme, serta hambatan pendengaran atau penglihatan. Pengamatan dilakukan melalui aktivitas sehari-hari di kelas, misalnya cara siswa berinteraksi, mengikuti instruksi, berkonsentrasi, atau berkomunikasi. Guru kemudian mencatat perilaku-perilaku yang dianggap tidak biasa dan dapat melakukan penyaringan awal menggunakan alat asesmen sederhana yang tersedia di sekolah atau melalui pelatihan dari Dinas Pendidikan. Proses identifikasi ini sangat penting agar siswa dengan kebutuhan khusus bisa memperoleh dukungan yang sesuai sejak tahap awal pendidikan mereka. Tahap identifikasi kemudian dilanjutkan dengan melibatkan orang tua. Komunikasi antara guru dan orang tua menjadi kunci untuk memperoleh informasi tambahan tentang kondisi anak di rumah. Orang tua dapat menyampaikan riwayat kesehatan, kebiasaan, atau perilaku anak yang mungkin tidak tampak saat berada di sekolah. Informasi ini membantu guru mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kebutuhan anak sehingga dapat menentukan bentuk dukungan yang paling tepat.

Setelah proses identifikasi awal, dilakukan penilaian lanjutan dengan bantuan tenaga profesional, seperti psikolog atau dokter spesialis anak. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan diagnosis serta mengetahui jenis intervensi yang sesuai. Di beberapa sekolah inklusi, layanan asesmen mendalam ini sudah menjadi bagian dari program pendidikan khusus yang diberikan secara rutin, meskipun tidak semua sekolah termasuk sekolah ini menjalankannya secara optimal. Hasil penilaian komprehensif tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) bagi siswa ABK. RPI merupakan dokumen yang memuat strategi pembelajaran, metode, dan pendekatan yang akan digunakan guru untuk mendukung proses belajar anak. Penyusunan RPI disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih tepat dan berkembang secara optimal di lingkungan sekolah inklusif (Salma, 2025).

Tahap kedua dalam penelitian ini adalah pelaksanaan seminar parenting yang berfokus pada kesiapan orang tua dalam mendampingi anak usia dini, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Pada tahap ini, penekanan diberikan pada pentingnya pemahaman mendalam tentang cara mendampingi anak di masa awal kehidupannya. Seminar tersebut tidak hanya menyampaikan informasi umum mengenai perkembangan anak usia dini, tetapi juga memberikan gambaran luas tentang berbagai model pendampingan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka. Pembahasan khusus terkait pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus juga dihadirkan, menekankan perlunya penyesuaian strategi bagi anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda. Materi yang disampaikan membantu orang tua memahami lebih menyeluruh tentang fase perkembangan anak usia dini serta bagaimana mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk mendampingi mereka. Dalam konteks anak berkebutuhan khusus, pemahaman mengenai pendekatan yang lebih spesifik menjadi sangat penting karena setiap anak dapat memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pada kebutuhan individual masing-masing anak, termasuk dalam menentukan strategi pendampingan yang tepat.

Selain memberikan penjelasan tentang perkembangan anak secara umum, seminar ini juga bertujuan menyediakan panduan praktis bagi orang tua dalam menghadapi tantangan selama mendampingi anak usia dini. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan dapat membantu orang tua merespons kebutuhan anak-anak mereka dengan lebih baik, termasuk dalam mendukung kemampuan regulasi emosi pada anak-anak berkebutuhan khusus (Kuasmawati, 2024).

Pendidikan inklusi juga dipengaruhi oleh teori ekologi Urie Bronfenbrenner, yang menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, mulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah (mikrosistem) hingga lingkungan yang lebih luas (makrosistem). Dalam konteks pendidikan inklusif, teori ini menegaskan pentingnya dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Setiap pihak diharapkan bekerja sama agar tercipta suasana belajar yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Di tingkat sekolah dasar seperti SDN Ciracas, penerapan pendidikan inklusi dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk penyesuaian kurikulum dan modifikasi metode pembelajaran. Namun, sekolah ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam penyediaan dukungan tambahan seperti keberadaan guru pendamping khusus (GPK). Penyesuaian kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan kemampuan siswa sehingga semua anak tetap memiliki peluang yang setara untuk mencapai keberhasilan. Sementara itu, variasi metode mengajar misalnya penggunaan media visual atau pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari para siswa (Salma, 2025).

Untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang efektif, diperlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus saling mendukung guna membangun lingkungan belajar yang benar-benar inklusif bagi

semua anak. Pelatihan serta pengembangan kompetensi bagi para pendidik juga perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan praktik pendidikan inklusif di kelas. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, berbagai perangkat digital dapat menjadi sarana penting untuk menunjang pendidikan inklusi. Teknologi mampu membantu mengurangi hambatan akses serta menyediakan solusi yang lebih personal bagi siswa berkebutuhan khusus. Melalui aplikasi, perangkat lunak, atau alat bantu digital lainnya, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih optimal sekaligus mempermudah komunikasi dan kerja sama antara guru dan siswa (Mustika, 2023).

Secara prinsip, pendidikan inklusif bertujuan memastikan bahwa setiap siswa termasuk mereka yang memiliki disabilitas, kebutuhan khusus, maupun berasal dari latar belakang yang beragam mendapat kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan metode mengajar, materi pembelajaran, serta strategi pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan individual. Hal ini mencakup penyesuaian lingkungan kelas, penyediaan dukungan tambahan seperti bimbingan atau alat bantu, serta pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap keragaman siswa.

Pendidikan inklusif tidak sekadar menempatkan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi juga mengubah cara berpikir dan praktik pendidikan secara menyeluruh. Perubahan ini mencakup pembentukan budaya sekolah yang lebih inklusif, pelatihan bagi guru serta staf, dan kebijakan yang mendukung partisipasi aktif seluruh siswa. Pendekatan ini menuntut kerja sama antara guru, orang tua, dan pihak lain agar setiap siswa memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi optimalnya.

Selain itu, pendidikan inklusif mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dengan menghapus berbagai hambatan serta memberikan dukungan yang tepat, pendidikan inklusif turut mengurangi ketidakadilan yang mungkin dialami siswa yang dianggap berbeda. Upaya ini menciptakan suasana belajar yang lebih adil dan menerima, di mana semua siswa dihargai, merasa menjadi bagian dari komunitas sekolah, dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam proses belajar (Sumartik, 2024).

Dasar Hukum Pendidikan Inklusif

Di Indonesia, pelaksanaan pendidikan inklusif diperkuat oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan dasar hukum agar setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas. Salah satu aturan utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan harus diberikan secara adil dan berkualitas kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang atau kondisi tertentu, sehingga menjadi landasan kuat bagi penerapan pendidikan inklusif. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga berperan penting dalam mendorong pendidikan inklusi. Aturan ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, aksesibel, dan inklusif. Undang-undang tersebut memandatkan penyesuaian di lingkungan pendidikan agar siswa dengan disabilitas dapat mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) turut memperkuat prinsip inklusi dengan memberikan pedoman agar layanan PAUD dapat diakses oleh seluruh anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Peraturan ini menekankan pentingnya adaptasi dan dukungan sejak pendidikan usia dini agar seluruh anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan belajar (Sumartik, 2024).

Prinsip-prinsip pelaksanaan program perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas mencakup beberapa hal penting. Pertama, prinsip nondiskriminasi, yang berarti setiap anak penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan tanpa membedakan suku,

agama, ras, jenis kelamin, maupun kewarganegaraan. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu setiap upaya perlindungan harus mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak penyandang disabilitas. Ketiga, prinsip hak untuk hidup dan berkembang, yang menegaskan bahwa perlindungan diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, prinsip keadilan, yaitu pemberian perlindungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing anak. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan anak dengan keterbatasan dapat memperoleh akses pendidikan dan pembelajaran secara optimal. Meski demikian, pendidik tetap memerlukan tenaga, perhatian, serta kesabaran ekstra dalam mendampingi perkembangan anak-anak tersebut.

Adapun dasar hukum pelaksanaan program perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities);
- 15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas;
- 16) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) (Husna, 2019).

Implementasi Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melakukan penyesuaian pada berbagai aspek sistem pendidikan agar semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus dapat memperoleh akses belajar yang setara dan berkualitas. Salah satu langkah utamanya adalah menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum perlu dirancang agar mampu mengakomodasi keragaman kemampuan siswa, termasuk melakukan modifikasi pada materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing anak. Metode pengajaran juga harus bersifat fleksibel, menggunakan strategi serta alat bantu yang mendukung keberagaman kebutuhan, seperti teknologi asistif atau media visual yang memudahkan siswa berkebutuhan khusus terlibat aktif dalam pembelajaran.

Guru di lembaga pendidikan Islam juga perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menerapkan prinsip inklusi secara optimal. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang strategi pengajaran yang sesuai untuk siswa dengan kebutuhan khusus serta keterampilan dalam mengenali dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Pengembangan profesional tersebut membantu guru menerapkan pendekatan inklusif sekaligus menciptakan suasana belajar yang mendukung bagi semua siswa.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu menyediakan dukungan tambahan dan fasilitas yang memadai. Hal ini dapat meliputi pembentukan tim pendukung yang terdiri dari guru pendamping, psikolog pendidikan, dan tenaga ahli lain yang berperan dalam merancang serta melaksanakan program pendidikan inklusif. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan alat bantu pembelajaran khusus juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus dapat mengikuti proses pendidikan tanpa hambatan (Sumartik, 2024). Pelaksanaan pendidikan inklusif adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen dalam dunia pendidikan, agar inklusivitas benar-benar dapat terwujud sebagai wadah yang mendukung semua peserta didik (Mansur, 2018).

Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Surabaya dalam penelitian ini dianalisis melalui dua variabel utama, yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi berdasarkan teori Merilee S. Grindle. Pada variabel isi kebijakan terdapat beberapa subvariabel, salah satunya adalah *kepentingan kelompok sasaran*. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menjadi landasan kebijakan dalam pelaksanaan program ini. Regulasi tersebut dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, khususnya pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada sekolah-sekolah yang ditunjuk
- 3) Pemerintah serta Pemerintah Provinsi berkewajiban membantu penyediaan sumber daya tersebut.

Agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak berkebutuhan khusus di Jawa Timur, dibutuhkan aturan khusus di tingkat provinsi, sehingga lahirlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah tersebut (Sudarto, 2016).

Tujuan utama pendidikan khusus inklusif adalah memastikan bahwa seluruh anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan yang efektif, mulai dari usia dini hingga jenjang menengah, sehingga mereka mampu mencapai perkembangan optimal sebagai bekal hidup ketika terjun ke masyarakat setelah lulus sekolah. Karena itu, kurikulum memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan mereka. Pelaksanaan kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan dari peran guru, yang berfungsi mengarahkan proses pembelajaran agar anak dapat berkembang secara kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Tenaga pendidik di sekolah inklusi memiliki posisi yang sangat krusial karena mereka tidak hanya membantu mengatasi kesulitan belajar, tetapi juga memberdayakan dan memfasilitasi perkembangan anak berkebutuhan khusus serta mendukung keluarga mereka. Peran ini melampaui sekadar memberikan bantuan akademik; guru diharapkan mampu mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih mandiri dan sukses setelah menyelesaikan pendidikan formal. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Banyak sekolah inklusi yang masih memerlukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang sangat beragam. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemampuan guru menjadi aspek penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkeadilan (Purbasari, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan belajar yang setara, bermartabat, dan berkualitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini bukan sekadar dukungan teknis, melainkan komitmen kolektif untuk mengubah cara pandang terhadap keberagaman dan mengatasi hambatan yang selama ini membuat anak berkebutuhan khusus belum sepenuhnya memperoleh hak pendidikan secara optimal. Proses awal implementasi pendidikan inklusi terlihat dari mekanisme identifikasi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dilakukan melalui observasi guru, komunikasi dengan orang tua, serta asesmen lanjutan oleh tenaga profesional. Tahap ini menjadi fundamental karena kualitas identifikasi menentukan ketepatan intervensi yang diberikan kepada anak. Hasil identifikasi kemudian digunakan untuk menyusun Rencana Pembelajaran Individual (RPI) yang berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam memberikan dukungan belajar yang sesuai. Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi mensyaratkan pendekatan yang personal, terukur, dan sensitif terhadap kondisi setiap anak.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan peran signifikan orang tua melalui seminar parenting yang membekali mereka dengan pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini dan strategi pendampingan anak berkebutuhan khusus. Kesiapan orang tua secara fisik maupun psikologis mempengaruhi kualitas interaksi anak di rumah dan sekolah. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga keluarga sebagai lingkungan perkembangan paling awal bagi anak. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi berbagai hambatan. Kekurangan sumber daya seperti guru pendamping khusus (GPK), minimnya pelatihan terkait strategi pembelajaran inklusif, serta keterbatasan fasilitas pendukung menjadi tantangan nyata yang menghambat pemenuhan hak belajar bagi ABK. Meskipun demikian, keberadaan kerangka hukum seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta berbagai peraturan pemerintah terkait PAUD dan perlindungan anak memberikan landasan kuat untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun, kebijakan yang baik akan sulit terwujud tanpa implementasi yang konsisten dan dukungan administratif yang memadai di tingkat sekolah.

Penelitian juga menegaskan relevansi teori ekologi Bronfenbrenner yang menunjukkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berlapis-lapis lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa pendidikan inklusif tidak dapat berjalan hanya melalui perubahan pada struktur sekolah, melainkan harus melibatkan kultur sosial yang inklusif. Dengan demikian, masyarakat memegang peran besar dalam menciptakan atmosfer yang menerima keberagaman dan mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Konsekuensi logis dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendidikan yang adaptif, serta penguatan koordinasi antara lembaga pendidikan dan keluarga. Selain itu, sekolah perlu menumbuhkan budaya inklusi melalui pelatihan, supervisi, dan kebijakan internal yang berpihak pada kebutuhan semua siswa. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses pembelajaran dan menyediakan dukungan individual bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan inklusif dapat berkembang menjadi sistem yang benar-benar mampu menghilangkan hambatan belajar dan memastikan setiap anak mencapai potensinya secara optimal.

Referensi

- HANAN, A. L., PUJASMARA, D. E., SOPIAH, R. N., TOSAINI, S. P., SYAHIDAH, S. M., & PRIHANTINI, P. (2025). Peran kompetensi kepala sekolah dalam membangun budaya inklusif di sekolah dasar. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 277-289.
- Harefa, A. T., & Lase, B. P. (2024). Peran pendidikan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial. *Journal of Education Research*, 5(4), 4288-4294.
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam dimensi politik hukum pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207-222.
- Kusmawati, A., Sa'diyah, R., & Rahman, I. (2024). Pembentukan Komunitas Parenting di Sekolah: Upaya Meningkatkan Regulasi Emosi Anak Berkebutuhan Khusus Di SD Muhammadiyah 37, Tangerang Selatan. *LITERA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 49-57.
- Lensa, R., Jufni, M., & Hadijaya, Y. (2025). Community Engagement dalam Pendidikan Multikultural. *ALACRITY: Journal of Education*, 288-301.
- Mansur, H. (2018). Implementasi Pendidikan Inklusif.
- Mustika, D., Irsanti, A. Y., Setiyawati, E., Yunita, F., Fitri, N., & Zulkarnaini, P. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41-50.
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 7(1), 50-58.
- Salma, Q. A., & Najibah, F. (2025). Pendidikan Inklusi di SDN Ciracas Jakarta Timur: Tantangan dan Implementasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(2), 20-20.
- Santoso, B., Rahayu, S., Fitriani, D., & Syahputra, A. (2023). Transformasi Pendidikan Inklusif: Optimalisasi Kesetaraan Melalui Metode Pembelajaran Responsif Dan Keterlibatan Komunitas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PEMAS)*, 1(1), 17-24.
- Sudarto, Z. (2016). Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 1(1), 97-106.
- Sumartik, S. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah. *Analysis*, 2(1), 195-203.